KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Deportasi massal PMI ilegal, komisi IX minta pemerintah bergerak
Tanggal : Minggu, 01 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Deportasi Massal PMI Ilegal

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Bergerak

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah bersikap proaktif melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam deportasi massal dari Malaysia. Pemerintah wajib menjamin keselamatan, hakhak, serta kepastian penanganan PMI tanpa mengabaikan persoalan status keimigrasian mereka.

Chusnunia menegaskan, perlindungan terhadap WNI di luar negeri menjadi prioritas utama Pemerintah dalam setiap kebijakan luar negeri. Persoalan status legalitas tidak boleh jadi alasan mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam memperlakukan PMI yang mencari penghidupan layak di Malaysia.

Meski sasaran deportasi Pemerintah Malaysia adalah PMI berstatus ilegal, kata dia, mereka mesti diperlakukan secara adil. "Status keimigrasian memang harus diselesaikan sesuai aturan hukum berlaku, tapi pendekatannya jangan sampai mengabaikan hak dasar dan martabat kemanusiaan mereka," ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Dia menyoroti realitas tenaga kerja Indonesia yang telah lama jadi bagian aktivitas ekonomi di Malaysia. Karena itu persoalan PMI tidak semata dipandang dari sudut pelanggaran administrasi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, kemanusiaan, serta hubungan baik kedua negara yang secara proporsional.

Selama ini, Malaysia juga menerima kehadiran tenaga kerja Indonesia dengan berbagai latar belakang dan status di sektor formal maupun informal. Karena itu penanganan persoalan ini harus dilakukan secara proporsional dan adil. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai aturan, tapi jangan korbankan kemanusiaan dan keadilan.

Pemerintah Indonesia tidak boleh hanya bergerak setelah ancaman deportasi muncul dari Malaysia. Perlindungan PMI perlu dimulai sejak proses perekrutan, pemberangkatan, hingga bekerja di negara tujuan secara resmi. "Pengawasan yang lemah terhadap jalur penempatan berisiko membuka praktik ilegal, penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan orang," ingatnya.

Di saat yang sama, dia mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dan keberangkatan cepat ke luar negeri tanpa kepastian legalitas. Karena tawaran kerja yang tampak menguntungkan bisa berujung persoalan serius. Terutama jika tidak disertai kontrak jelas, dokumen resmi, dan informasi pemberi kerja.


FOTO: FB PRIBADI
Nihayatul Wafiroh

Jangan sampai masyarakat tergiur janji manis, tapi akhirnya menghadapi masalah hukum dan kehilangan perlindungan ketika berada di luar negeri. Pastikan jalur keberangkatan, dokumen, kontrak kerja, dan pihak penyalur benar-benar jelas dan resmi. "Jangan mempertaruhkan masa depan hanya karena iming-iming pekerjaan instan," tegasnya.

Dia juga meminta Pemerintah memperluas edukasi kepada calon PMI hingga tingkat desa. Sehingga masyarakat tidak hanya memahami peluang kerja di luar negeri, tapi juga mengetahui risiko dan prosedur yang harus dipenuhi. Pendampingan sebelum keberangkatan dibutuhkan agar calon pekerja memiliki bekal informasi memadai.

Chusnunia menyebut, sikap tegas Pemerintah diperlukan dalam dua hal sekaligus. Pertama memperjuangkan perlindungan WNI yang menghadapi ancaman deportasi dari Malaysia, kedua membenahi pengawasan terhadap praktik penempatan PMI nonprosedural. Kedua persoalan itu perlu ditangani beriringan agar masalah serupa tidak terus berulang di kemudian hari.

Negara, sambungnya, harus hadir sejak awal, bukan hanya ketika warganya sudah menghadapi ancaman deportasi di luar negeri. PMI yang sedang bermasalah mesti mendapat perlindungan, sekaligus mencegah masyarakat jadi korban penempatan ilegal. "Ketegasan hukum wajib berjalan bersama perlindungan dan keadilan bagi semua warga tanpa terkecuali," ucapnya.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menilai, negara perlu hadir memastikan hak PMI terlindungi sekaligus mengantisipasi dampak kepulangan mereka. Pekerja migran adalah pahlawan devisa dan patriot sejati yang menopang perekonomian nasional. Perlindungan terhadap mereka menyangkut keadilan, jaminan sosial optimal, serta martabat bangsa.

Rieke mengusulkan Pemerintah memperkuat diplomasi dengan Pemerintah Malaysia agar hak keperdataan PMI dipenuhi sebelum proses deportasi dilaksanakan. Pemerintah diminta menyiapkan langkah kontingensi melalui koordinasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), TNI, dan Polri. Langkah itu untuk mengantisipasi kepulangan PMI massal melalui wilayah perbatasan. ■ PYB